

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Padang selama periode pemerintahan Wali Kota Padang 2019–2024 adalah upaya legislatif daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Hak interpelasi telah digunakan sebagai sarana konstitusional untuk meminta penjelasan atas sejumlah kebijakan yang dinilai strategis, berdampak luas, dan memunculkan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya kebijakan yang tidak transparan atau tidak dikonsultasikan dengan DPRD. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan hak interpelasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari pihak eksekutif yang cenderung defensif dan kurang kooperatif. Dalam beberapa forum interpelasi, kepala daerah tidak hadir secara langsung, dan hanya mengirimkan perwakilan teknis. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen untuk membangun komunikasi politik yang sejajar dan terbuka dengan DPRD.
2. Dampak pelaksanaan hak interpelasi juga terbentur pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, tidak ada ketentuan yang mewajibkan wali kota hadir dan memberikan jawaban secara langsung, sehingga mekanisme ini kehilangan daya tekan. Secara kultural, hubungan eksekutif-legislatif masih belum sepenuhnya egaliter, yang menyebabkan fungsi pengawasan sering

disalahartikan sebagai tekanan politik, bukan sebagai bagian dari sistem checks and balances dalam demokrasi lokal. Meskipun demikian, penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Padang tetap relevan dan penting dalam kerangka mewujudkan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik. Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal, diperlukan perubahan sikap dari kedua belah pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan memperkuat pelaksanaan hak interpelasi secara substantif, DPRD Kota Padang dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak hak interpelasi oleh DPRD Kota Padang selama periode 2019–2024 memberikan Hasil signifikan dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan Wali Kota. Interpelasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana formal untuk meminta klarifikasi atas kebijakan eksekutif, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi yang memperkuat peran DPRD dan menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Melalui pelaksanaan interpelasi, terjadi peningkatan kesadaran publik mengenai fungsi pengawasan DPRD. Masyarakat mulai melihat bahwa lembaga legislatif memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Ini memperkuat citra DPRD sebagai wakil rakyat yang aktif dan responsif terhadap persoalan publik. Namun demikian, praktik interpelasi juga menghadapi tantangan. Respon eksekutif yang

cenderung defensif serta komunikasi yang belum optimal antara legislatif dan eksekutif menunjukkan masih rendahnya budaya dialog dan kemitraan institusional. Hal ini menjadi hambatan dalam pencapaian pemerintahan yang partisipatif dan terbuka. Secara keseluruhan, hak interpelasi yang digunakan oleh DPRD Kota Padang telah berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meskipun masih diperlukan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk membangun sinergi demi terwujudnya prinsip-prinsip good governance di tingkat lokal.

B. Saran

1. Agar terjadi Penguatan fungsi pengawasan melalui penggunaan hak interpelasi secara konsisten, objektif, dan terukur. Selain itu, DPRD perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik agar setiap proses interpelasi dapat dipahami masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
2. Agar terjadi Peningkatan respon hak interpelasi Pemerintah Kota secara konstruktif, bukan sebagai bentuk perlawanan politik. Interpelasi seharusnya dipahami sebagai ruang evaluatif yang sehat untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan publik. Diperlukan pula peningkatan kemitraan dan komunikasi yang setara antara eksekutif dan legislatif guna membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.
3. Agar terjadi Peningkatan pengawasan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan daerah serta mendukung proses pengawasan yang dilakukan DPRD. Kesadaran kolektif tentang pentingnya pengawasan demokratis akan menjadi kekuatan sipil dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdullah Rozali, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternative*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2011, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, Erlangga, Jakarta.

Komaruddin, 2014, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta.

Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah(Buku Ajaran)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Saebani Ahmad Beni dan Zulkarnaen, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung.

Sujamto, 2010, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Jogjakarta.

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 2012, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

C. Sumber Lain

- Arrazi Fakhrudin, Sah! 8 Anggota DPRD Padang Ajukan Hak Interpelasi terhadap Wali Kota, <https://padangkita.com/sah-8-anggota-dprd-padang-ajukan-hak-interpelasi-terhadap-wali-kota/> Diakses pada 03 Mei 2025.
- Abidin, Benny, and Ratna Herawati. "FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BATANG." *LAW REFORM* 14, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20872>.
- Adhyaksa, M. Faza, and Mirja Fauzul Hamdi. "Implementasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17771>.
- Aflah, Muhammad Nur, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Agustina, Monika. "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1499>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Ahlan, Andy Muhammad Zulkarnain, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality, and Dri Sucipto. "MEKANISME HAK ANGKET DALAM RANGKA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH." *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1920>.
- Ahmadi, Adri, and Arief Rahman. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengawasan Hutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan Untuk Lahan Pertanian." *Private Law* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2134>.
- Ambarwati, Ambarwati. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi." *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK* 6, no. 3 (2021).

<https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i3.128>.

- Ambarwati, Arie. "HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, DAN ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR DENGAN KINERJA ORGANISASI." *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30871/jaba.v3i1.1289>.
- Anam, Syaiful, and Khairil Anwar. "EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAYANAN PUBLIK." *REFORMASI* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>.
- Apriansyah, Aldi, Dedi Supriadi, and Mariana Dwi Aulia. "Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa Dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 7 (2023). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2400>.
- Ardi, Ardi. "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda APBD Kota Sorong No.32 Tahun 2014." *JUSTISI* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33506/js.v4i1.528>.
- Armando, Gerry. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah." *Jornal Universitas Negeri Padang*, 2018.
- Arso, Tri, and Gunawan Hi Abas. "Konsistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD Tahun 2019." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2287>.
- Asiri, La. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton)." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.367>.
- Ayu, Nurrizha, and Asep Nurjaman. "Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>.
- Azahra, Alma, and Fauzi Arif Lubis. "Peran DPRD Dalam Pengawasan Dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (2021).
- Azifi, M. Riswan, and Marliyah. "PERAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN

FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MEDAN.” *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250>.

Bimo Aryo Alvi Syahrin, and Wiratno Wiratno. “KEWENANGAN DPRD KOTA BEKASI MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA BEKASI.” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16458>.

Budiyono, Budiyono. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368>.

Daerah, Rakyat, and Kota Manado. “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.” *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2017).

Dilapanga, Chantika Sari, Alden Laloma, and Very Y. Londa. “Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaag Mongondow.” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 90 (2020).

Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018).

Djauhari, A. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i2.1427>.

Elda, Natalia, Sulistyo, and Eris Dianawati. “PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA MALANG.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5470>.

Faddila, S; Argenti, G; Gumilar, G. “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022).

Faizal, Liky. “Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal TAPIS* 7, no. 13 (2011).

Febriandiela, Fifi, and Aldri Frinaldi. “PERAN PEMERINTAH DAERAH

TERHADAP PENGAWASAN PERTAMINA SHOP.” *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.25185>.

Fitria. “Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah.” *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, no. Vol. 7 No. 3 (2014): INOVATIF (2014).

Fitria, Heny Nur. “IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SURABAYA.” *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7348>.

Ginting, Eriko Fahri, and Dian Agung Wicaksono. “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.403-418>.

Gorab, Jeklin. “Kinerja DPRD Dibidang Pengawasan Pembangunan.” *Jurnal Politico* 2, no. 1 (2013).

Hakim, Bawon Nul. “FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 3, no. 2 (2019). https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v3i2.457.

Hakim, Ifham. “PENGAWASAN INTERN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020: SEBUAH TINJAUAN.” *Jurnal Acitya Ardana* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1341>.

Hamonangan, August. “PENGAJUAN HAK INTERPELASI ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SERTA MENGANTISIPASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8198>.

Hariatih, Hariatih. “STUDI TENTANG KINERJA PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA.” *JURNAL PENKOMI KAJIAN PENDIDIKAN DAN EKONOMI* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33627/pk.v4i2.561>.

Ilham, La Ode Husen, and Syamsuddin Pasamai. “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Di Propinsi Sulawesi Selatan.” *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, 2021.

- Isay Wenda, Ermaya Surdinata, and M. Irwan Tahir. "FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT." *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* 13, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.480>.
- Juniati, Risna. "Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Terhadap Opini Laporan Keuangan." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 18, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i1.5599>.
- Kariem, Muhammad Quranul. "ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA (DIY) TERHADAP IMPLEMENTASI KEISTIMEWAAN." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.61-81>.
- Kasenda, Rudolf Johnly, Novie R. Pioh, and Maxi Egeten. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Manado." *Sam Ratulangi: Development Resources Management Review* 1, no. 1 (2020).
- Kasmawati, Kasmawati, and Tengku Rafizal. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 2, no. 2 (2022). [https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2\(2\).9379](https://doi.org/10.25299/jkp.2016.vol2(2).9379).
- Kuncoro, Wahyu. "Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya Dalam Pengawasan Intelijen Yang Akuntabel Di Badan Intelijen Negara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5629>.
- Kurnia, Ade, Sudirman Sudirman, and Reka Asmi Tira. "Implementasi Fungsi Pengawasan (Controlling) DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Di Bidang Pendidikan." *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i2.8637>.
- Kurniawan, Andre, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, and Muhammad Jordan Edison. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>.
- Kurniawan, Ridha. "MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." *JURNAL YURIDIS UNAJA* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i1.103>.

Lathif, Nazaruddin. "TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT." *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

LGSP. "Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik." *Sxience*, 2009.

Lubis. "Peranan Sosiologi Hukum Dalam Meningkatkan Kemampuan Dan Analisis Efektivitas Hukum Pada Masyarakat Kota Pematangsiantar." *Jurnal Ilmiah Simantek* 2, no. 3 (2018).

Marisca Evalina Gondokesumo, and Nabbilah Amir. "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan)." *Perspektif Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>.

Marpaung, Parlindungan, and Universitas Darma Agung. "Analisis Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan." *Jurna Governance Opinion* 5, no. 1 (2020).

Muhammad Iqbal N, Randy Aulia N, and M Rafly Ashari. "IMPLEMENTASI PENGAWASAN LEGISLATIF (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020)." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2705>.

Murniati, Sitti. "PENGARUH PENGAWASAN, SISTEM AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH." *AkMen JURNAL ILMIAH* 17, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i4.1154>.

Mustari, Mustari. "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Wajo." *PLENO JURE* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.396>.

Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084>.

Pradana, Alicya Cindy, and Muhammad Farid Ma'ruf. "Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa." *Publika* 9, no. 1 (2021).

- Praptomo. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.
- Putu Adinda Aneira Adnyana Putri. "PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>.
- Razaq Abqa, Muhammad Ardhi, and Faris Apriyadi. "PENGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN FORMULA-E." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v7i1.2069>.
- Ridha Kurniawan, and Arriskianti Maulida. "MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." *JURNAL YURIDIS UNAJA* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i1.136>.
- Rifa'i, Ahmad, and Sri Kusriyah. "Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 2 (2019).
- Rindani, Novia, and Februati Trimurni. "KAPASITAS DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 5, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.990>.
- Rinjani, Diliya Mariam. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA MASSAL ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.87>.
- Rizky, Ali, Rizal Muchtasar, Rahman Hasima, and Ilham Ilham. "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah." *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.46891/kainawa.1.2019.73-85>.
- Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Yusuf DM, MohdMilthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Santoso, Bagus Teguh, Ahmad Munir, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Hukum, and Keuangan Negara. "Upaya Pencegahan

Perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan Yang Berakibat Merugikan Keuangan Negara Melalui Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2023).

Saputra, Yulianta. “Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.48>.

Saraswati, Dewi. “PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL MODERATING PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Empiris Pada DPRD Kota Jambi.” *JURNAL RISET AKUNTANSI JAMBI* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35141/jraj.v2i1.288>.

Setiyowati, Lis, and Budi Ispriyarso. “UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRD.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265>.

Sinta, Sinta, Muhammad Massyat, and Nur Fitrah. “FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA.” *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35329/jp.v4i2.1149>.

Sriyanti, Esi, Siska Yulia Defitri, and Netti Indrawati. “Efek Karakteristik Pekerjaan Untuk Mengetahui Komitmen Organisasi.” *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 2, no. 2 (2022).

Suargita, I Nyoman, Yudistira Adnyana, and Ni Luh Putu Suastini. “ANALISIS IMLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI TENTANG PENDALAMAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD).” *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6127>.

Sunarto, Sunarto. “PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan Antara Era Orde Baru Dan Era Reformasi).” *Integralistik* 29, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14604>.

Syafina, Laylan, Ulfatul Makwa, and Nurlaila Nurlaila. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 1 (2022).

<https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1279>.

Tayib, Abdul, and Sumarni. "Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD." *Unizar Law Review* 1, no. 2 (2018).

Tondang, R. U. R., dan Robin, R. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Dan Akuntabilitas Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Studi Pada Dprd Provinsi Kepulauan Riau." *Open Journal Systems* Volume XVI, no. 1978 (2022).

Widodo, Hananto. "POLITIK HUKUM HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012).
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.94>.

Wifaqah, Sandy. "Jurnal Kebijakan Pemerintahan." *KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN ALAT KESEHATAN* Sandy Wifaqah * Universitas Esa Unggul Sandywifaqah2@gmail.Com, Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, Indonesia * 3, no. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan. Fenomena (2020).

WIFAQAH, SANDY. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2020.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1039>.

Yustina, Irda, Robi Cahyadi Kurniawan, and Himawan Indrajat. "PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN DISTRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG." *Wacana Publik* 13, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.37295/wp.v13i02.34>.

Yusuf DM, Mohd, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

DPRD Kota Padang, Anggota DPRD Kota Padang ajukan hak interpelasi atas kekosongan Wawako, <https://dprd.padang.go.id/anggota-dprd-kota-padang-ajukan-hak-interpelasi-atas-kekosongan-kursi-wawako> diakses pada 04 Mei 2025.

Muhammad Ali Adnan dan Sunarto Atika, 2021, Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, *Jurnal Kaidah Hukum*, Vol 20 No III hlm.349-350.

Nafiatul Munawaroh, Apa itu hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan

pendapat?, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/apa-itu-hak-angket-hak-interpelasi-dan-hak-menyatakan-pendapat> diakses pada 06 Mei 2025.

Rahmadi, Soal BLT Corona 4 Fraksi DPRD Padang Sepakat Interpelasi Wali Kota, https://langgam.id/soal-blt-corona-4-fraksi-dprd-padang-sepakat-interpelasi-wali-kota/#google_vignette Diakses pada 01 Mei 2025.